

SINAU SEJARAH HADEGING NAGARI Melacak Akar Sejarah Kota Yogya

YOGYA (KR) - Hadeging Nagari memiliki arti penting bagi masyarakat dan Pemerintah DIY untuk memantapkan jati diri sebagai landasan yang menjawai gerak langkah ke masa depan. Hadeging Nagari merupakan sebuah tonggak, suatu tetenger simbolik dimulainya sebuah pemerintahan di Yogyakarta.

"Oleh karena itu, Hadeging Nagari penting untuk diperingati sebagai refleksi terwujudnya idealisme, harapan-harapan, keselamatan, kesuksesan dan perjuangan tanpa henti guna meningkatkan kesejahteraan seluruh warga Yogyakarta," kata Sejarawan UGM, Bahauddin MHum.

Lebih lanjut Bahauddin menjelaskan, pasca selesainya rekonsiliasi dengan VOC, yaitu Perjanjian Giyanti (13 Februari 1755) dan dengan Paku Buwono III Perjanjian Jatisari (15 Februari 1755), sebulan kemudian, Sultan Hamengku Buwono I secara resmi memproklamasikan berdirinya Kasultanan Ngayogyakarta pada 13 Maret 1755, di hadapan para senatana dan pengikutnya, dan untuk pertama kalinya memberi nama negerinya Ngayogyakarta Hadiningrat.

"Pada saat itu juga ditetapkan lokasi kratonnya di hutan Beringan, yang di dalamnya terdapat Umbul Patethon dan Pesanggrahan Garjitawati," jelasnya.

Sultan HB I, menurut Bahauddin, merupakan sosok yang mumpuni, winisad dan visioner. "Oleh karena itu, tidak mengherankan jika pembangunan fisik kraton



KR-Wawan Isnawan
Bahauddin MHum

dan kota Yogyakarta mempunyai filosofi kehidupan yang mendalam," kata Bahauddin. Hal ini, lanjut Bahauddin, didasarkan atas kajian keilmuan keagamaan dan kitab-kitab Jawa yang dipelajari pada masa mudanya, sehingga Sultan HB I mampu mengimplementasikannya dalam sebuah karya yang agung berupa kraton dan kota Yogyakarta.

Sejarah Hadeging Nagari dengan generasi sekarang memang terlampaui jauh. "Salah satu pendekatan yang harus digalakkan untuk mengenalkan Hadeging Nagari kepada generasi milenial adalah mengubah format narasi sejarah dari bentuk teks menjadi bentuk visual, karena generasi milenial cara belajarnya lebih kuat aspek visualnya," kata Bahauddin.

Format narasi sejarah visual ini, menurut Bahauddin, dapat berupa komik atau film pendek yang informatif tapi ringan dan dapat diakses dengan mudah melalui smartphone, sehingga di

mana pun mereka bisa mengakses.

Untuk memperingati peristiwa 268 tahun Hadeging Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat, 13 Maret 1755, Paniradya Kaistimewan DIY bersama Sekber Keistimewaan DIY dan Asosiasi Guru Sejarah Indonesia (AGSI) mengadakan acara Sinau Sejarah Keistimewaan DIY 'Hadeging Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat'.

Acara ini digelar Senin (13/3), pukul 13.00-16.00 di Auditorium SMM (SMKN 2 Kasihan), Jalan Bugisan Selatan, Jomogatan, Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul dan ditayangkan *live streaming* melalui channel YouTube Paniradya Kaistimewan DIY.

Sinau Sejarah Keistimewaan DIY ini akan diikuti siswa dari SMM, SMSR dan SMKI serta guru sejarah.

Dalam Sinau Sejarah ini juga digelar Dialog Keistimewaan 'Melacak Akar Sejarah Kota Yogya' dengan narasumber GKR Mangkubumi (Kasultanan Ngayogyakarta), Aris Eko Nugroho SP MSi (Paniradya Pati Kaistimewan DIY), Bahauddin MHum (Sejarawan UGM), Agus Tony Widodo SPd (Ketua Asosiasi Guru Sejarah Indonesia/AGSI DIY) dengan moderator Wiji Rachmadani.

Acara tersebut bakal dimeoriakan musik orkestra dari siswa SMM, performance lukis wajah narasumber oleh siswa SMSR dan persembahan tari siswa SMKI serta Kuis Sejarah dipandu MC Alit Jabang Bayi dan Agus Sunandar. (Wan)

WORKSHOP INSTRUKTUR GAMELAN TAHUN 2023 20 Instruktur Gamelan Diterjunkan ke Sanggar Seni



KR-Istimewa

Dian Lakshmi Pratiwi SS MA memberi sambutan didampingi Dr Supadmo MHum dan Dra Dwi Puji Astuti.

YOGYA (KR) - Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) DIY bekerja sama dengan Akademi Komunitas Negeri Seni Budaya Yogyakarta, mengadakan Program Fasilitasi Instruktur Gamelan pada Sanggar Seni Penerima Hibah Gamelan Besi Gagrak Yogyakarta Laras Pelog Slendro.

Sebelum instruktur ditugaskan di sanggar seni, terlebih dahulu mengikuti Workshop Instruktur Gamelan 2023 yang diadakan di Pendapa Hotel Royal Brongto, Senin-Jumat (6-10/3). Workshop gamelan dimaksudkan untuk menambah pengetahuan, khususnya dalam karawitan gaya Yogyakarta.

Kepala Dinas Kebudayaan DIY, Dian Lakshmi Pratiwi SS MA mengatakan, tahun 2022 merupakan pelaksanaan pertama program fasilitasi instruktur gamelan dengan jumlah instruktur yang diterjunkan ke sanggar seni sebanyak 16 orang.

Sedangkan tahun 2023 ini jumlah instruktornya 20 orang. "Peserta workshop akan mulai diterjunkan di sanggar seni penerima hibah pada Mei mendatang," kata Dian.

Program fasilitasi instruktur gamelan ini mendapat sambutan yang baik dari sanggar seni. Menurut Dian, dari hasil evaluasi program fasilitasi instruktur gamelan tahun lalu, bahkan

ada kelompok seni yang sangat aktif. Dalam seminggu berlatih tiga kelompok yaitu bapak, ibu, dan pemuda. Instruktur sampai kewalahan dan akhirnya hanya mengambil satu kali selang.

Di sisi lain, lanjut Dian, sebagian besar kelompok seni masih ada yang berupaya mencari anggota. *Skill* teknis antarpemain juga sangat beragam. Ada yang sangat pemula, ada yang sudah bisa.

"Tapi ada juga sanggar atau kelompok seni yang kurang disiplin. Kadang instruktur sudah datang, tapi tidak jadi latihan," katanya.

Direktur Akademi Komunitas Negeri Seni Budaya Yogyakarta, Dr Supadmo MHum mengatakan, program fasilitasi instruktur ga-

melan ini melibatkan lulusan Akademi Komunitas Negeri Seni Budaya Yogyakarta, utamanya Program Studi Karawitan. "Instruktur akan bertugas selama empat bulan mengajar di sanggar seni dalam 20 kali pertemuan," jelasnya.

Misinya adalah untuk pemajuan seni dan budaya Yogyakarta, karena karawitan yang ada di masyarakat berbeda dengan materi yang diajarkan di perguruan tinggi yang bersumber dari Kraton Yogyakarta.

"Makanya kita sosialisasikan mengembangkan permainan karawitan gaya Yogyakarta, utamanya yang bersumber dari Kraton Yogyakarta dengan instrumen yang belum banyak dimiliki oleh masyarakat di luar kraton, yaitu instrumen bedug

dan bonang panembung dalam permainan gending soran," jelas Supadmo.

Dikatakan, workshop instruktur gamelan ini memang untuk karawitan gagrak Ngayogyakarta. Ada 12 gending yang nantinya diajarkan, terkait dengan gending karawitan yang disajikan murni karawitan, gending pedalangan, dan gending yang berkaitan dengan iringan tari.

Sedangkan Kepala Bidang Perencanaan Dinas Kebudayaan DIY, Dra Dwi Puji Astuti mengatakan, ke depan rencana diadakan perlakuan untuk mengukur capaian dari masing-masing sanggar seni.

Selain itu juga diharapkan ada penambahan jumlah instruktur, minimal 50 persen dari 64 penerima hibah gamelan. "Penerima hibah gamelan besi setiap tahunnya lebih dari 60, minimal setiap tahun ada peningkatan," katanya.

Memang, lanjut Dwi Puji Astuti, masih banyak penerima hibah gamelan besi yang belum dapat pendampingan. Dari hasil pelaksanaan program tahun 2022, bahkan ada sanggar seni yang swadana melanjutkan program dengan instruktur yang ditugaskan. "Meski programnya sudah selesai, tapi dari sanggar tetap minta pendampingan," katanya pula. (Wan)



KR-Istimewa

Workshop Instruktur Gamelan 2023 di Pendapa Hotel Royal Brongto.

SERIOUS SIKAPI PARTAI PRIMA

KPU RI Resmi Ajukan Banding

JAKARTA (KR) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang memerintahkan KPU menghentikan pelaksanaan tahapan Pemilu 2024 dan memulainya dari awal. Dalam mengajukan memori banding itu, KPU diwakili Kepala Biro Advokasi dan Penyelesaian Sengketa Andi Krisna.

"Hari ini (Jumat kemarin), KPU resmi menyampaikan memori banding di PN Jakpus dan kemudian tadi sudah kami sampaikan dokumen. Kami juga sudah terima akta permohonan banding, sehingga KPU sudah menyampaikan secara keseluruhan proses-proses atau substansi dokumen-dokumen banding tersebut," jelas Andi Krisna kepada wartawan di PN Jakarta Pusat, Jumat (10/3).

Dengan menyampaikan pengajuan banding tersebut, tegasnya, membuktikan, pelaksanaan Pemilu 2024 tetap berjalan. Hal ini sebagaimana disampaikan pimpinan KPU. "Proses dan tahapan berjalan

sebagaimana PKPU No 3 tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2024 yang sudah ditetapkan KPU," tutur Andi.

Anggota KPU Mochammad Afifuddin menyatakan, banding yang diajukan terhadap putusan PN Jakpus merupakan bentuk keseriusan mereka dalam menyikapi gugatan Partai Prima.

"Banding yang dilakukan KPU terhadap Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst sebagai bentuk keseriusan KPU dalam menghadapi dan menyikapi gugatan yang diajukan oleh Partai Prima," tegas Afifuddin.

Ia menyebutkan, saat ini KPU menunggu putusan dari hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terhadap banding yang telah diajukan. Hal ini, karena memori banding telah diterima PN Jakpus yang dibuktikan dengan penerbitan Akta Pernyataan Banding Nomor 4/SRT.PDT.BDG/2023/PN.Jkt.Pst. tertanggal 10 Maret 2023. (Ful)-d

HASIL KORUPSI MANTAN BUPATI SIDOARJO

KPK Sita Uang Tunai Rp 5,6 M

JAKARTA (KR) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai hasil tindak pidana korupsi senilai Rp 5,6 miliar dan barang berharga lainnya dari tangan mantan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah (SI). Barang bernilai ekonomi lainnya yang turut disita penyidik yakni uang tunai 64 ribu dolar Amerika Serikat, 10 buah tas merek TUMI, satu tas merek Louis Vuitton, empat unit ponsel dan logam mulia dengan ukuran 50 gram dan 25 gram.

"Tim Penyidik telah melakukan penyiitaan dalam bentuk uang tunai maupun barang, di antaranya uang tunai dalam bentuk pecahan mata uang rupiah senilai Rp 5,6 miliar," kata Kepala Bagian Pem-

beritaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Jumat (10/3).

Ali mengatakan, penyitaan barang bukti tersebut merupakan bagian dari proses penyidikan perkara dugaan penerimaan gratifikasi dengan tersangka SI. "Saat ini pengumpulan alat bukti masih terus dilakukan, termasuk untuk menelusuri berbagai penerimaan uang maupun barang lain oleh tersangka SI dimaksud," ujarnya.

Tersangka Saiful Ilah adalah mantan Bupati Sidoarjo dua periode yakni 2010-2015 dan periode 2016-2021. Tim penyidik saat ini menahan tersangka SI terhitung mulai tanggal 7-26 Maret 2023 di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih. (Ful)-d

TANAH BERKARAKTERISTIK KHUSUS TERDAMPAK TOL

Mulai Dilakukan Penaksiran Harga Sewa

YOGYA (KR) - Pemerintah terus melakukan sejumlah upaya percepatan pembangunan jalan tol termasuk yang melewati wilayah DIY. Dengan harapan tahapan pembangunan jalan tol bisa diselesaikan tepat waktu.

Salah satu upaya percepatan itu, Pemerintah Pusat melalui Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) saat ini tengah melakukan proses penaksiran harga atau appraisal untuk menentukan besaran sewa tiga jenis tanah berkarakteristik khusus yang terdampak proyek tol di DIY. "Saat ini Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR sedang melakukan

Krido Suprayitno di Yogyakarta, Jumat (10/3).

Menurut Krido, dalam penentuan sewa lahan tiga tanah berkarakteristik khusus tersebut, penanganannya berbeda dengan tanah warga yang terdampak pembangunan jalan tol. Karena untuk tanah berkarakteristik khusus akan menggunakan Serat Kekancangan yang diterbitkan oleh Kraton Yogyakarta yang saat ini sedang dibahas antara Pemda DIY, Pemerintah Pusat, dan Kraton Yogyakarta.

Begitu pula dengan besaran kompensasi sewa lahan. "Kalau untuk kekancangan saat ini masih dalam proses yang diformu-

lasikan bersama antara Pemda DIY, Kasultanan dan Pemerintah Pusat. Mudah-mudahan semua tahapan lancar sehingga proses berikutnya bisa segera dilakukan," ungkapnya.

Krido menjelaskan, kompensasi pembayaran sewa lahan untuk Tanah Kas Desa nantinya akan mengalir ke kalurahan. Dengan begitu kalurahan tidak kehilangan penghasilan setelah adanya proyek tol di wilayahnya. "Seperti yang disampaikan Ngarsa Dalem Sultan HB X, untuk jalan tol, Tanah Kalurahan sebagai hak anguduh dan SG ataupun PAG itu tidak dilepas," ujarnya. (Ria)-f

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Perbaiki Skor Indeks Persepsi Korupsi

JAKARTA (KR) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas menyebut adanya keterkaitan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan pemberantasan korupsi. Anas yakin penerapan SPBE yang maksimal bisa jadi jalan guna mengangkat skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang merosot 4 poin, dari 38 pada 2021 menjadi 34 di 2022.

"Kalau kita lihat di berbagai negara di dunia, indeks SPBE dengan indeks-indeks pengukuran yang lain itu punya keterkaitan. Kita cek Denmark dan Finlandia, mereka punya indeks pembangunan e-government yang sangat baik dan faktanya Indeks Persepsi Korupsinya juga menunjukkan rapor gemilang," ujarnya saat memberikan sambutan pada penandatanganan

Komitmen Pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi (PK) Tahun 2023-2024 Fokus 3 di Jakarta, Jumat (10/3). Penandatanganan Komitmen

pelayan publik bisa meningkatkan layanan Pemerintah kepada masyarakat, di sisi lain juga bisa mencegah terjadinya pungli, suap, dan sebagainya. "Namun demikian, sebagaimana sistem apapun, yang terbaik sekalipun kita bangun tapi kalau tidak diimbangi dengan integritas, percuma," ungkapnya.

Menteri PAN-RB mengatakan, penerapan SPBE di Indonesia telah diatur lewat Peraturan Presiden No 132/2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional. Aturan ini jadi komitmen Pemerintah mengakselerasi implementasi integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE yang bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

"Tentu ada urgensi penyelenggaraan SPBE ini. Pertama, memudahkan warga untuk mengakses layanan publik. Kedua, untuk menaikkan indeks persepsi korupsi, tingkat kemudahan berbisnis, indeks penegakan hukum, dan lain-lain," imbuhnya. (Ati)-f



KR-Antara/Andreas Fitri Armoko

FESTIVAL DALANG REMAJA: Peserta memainkan wayang kulit saat Festival Dalang Anak dan Remaja se-Kabupaten Sleman 2023 di Ndalem Pendhapa Baronga, Tempel, Sleman, Jumat (10/3/2023). Festival dalang yang diikuti puluhan peserta dari kategori anak usia 8-15 tahun dan remaja usia 16-20 tahun turut guna melestarikan dan mengembangkan seni tradisional khususnya pedalangan.